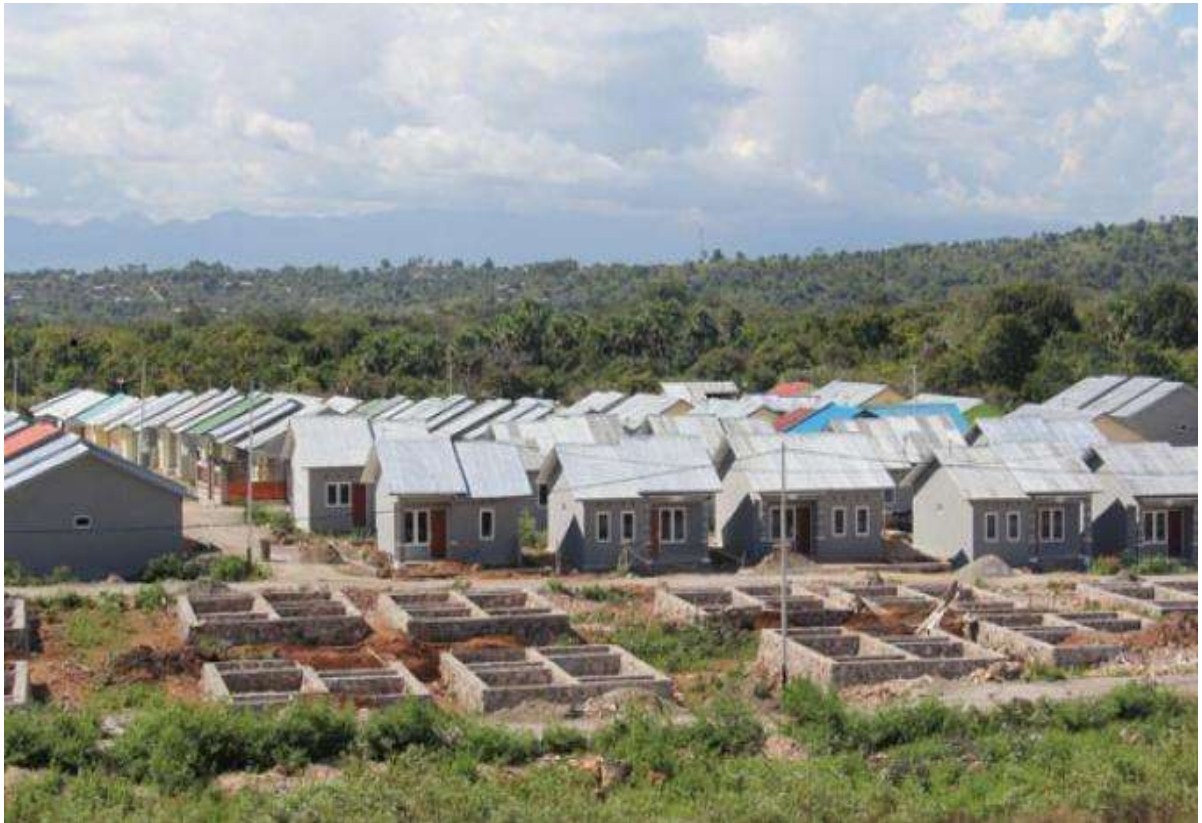




LAPORAN KINERJA (LKJ) KINERJA TAHUN 2023



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN GOWA**

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2023 dapat disusun sebagai wujud usaha organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan meningkatkan kinerjanya dalam rangka prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2021-2026 dan Rencana Startegis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten gowa bagi peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Sungguminasa, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS,

The image shows a circular official stamp of the Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Drs. ABDULLAH SIRADJUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19711001 199012 1 002

Daftar Isi.....	3
BAB I Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Gambaran Umum Organisasi.....	5
C. Isu Strategis.....	7
D. Strategi Organisasi.....	8
BAB II Perencanaan Kinerja.....	9
A. Tujuan dan Sasaran.....	9
B. Arah Kebijakan dan Strategi.....	12
C. Indikator Kinerja Utama	13
D. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	15
E. Standar Penilaian Kinerja.....	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP.....	32
A. Kesimpulan Capaian Organisasi.....	32
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja SKPD merupakan laporan instansi pemerintah yang menggunakan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah, yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi dan pengukuran kinerja yang efektif bagi upaya dan sarana untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamatkan bahwa dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBN/APBD wajib menyusun laporan kinerja, serta Permen PAN &RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah diarahkan untuk dapat mengelola dan mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik melalui penerapan manajemen kinerja yang sesuai dengan TUPOKSI di tiap bidang untuk selanjutnya berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh.

Laporan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gowa untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian Visi dan Misi serta tujuan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kab.Gowa sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 .

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan kewenangan :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah umum tidak layak huni dan korban bencana kota.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- c. Penerbitan rekomendasi teknis penyelenggaraan perumahan.
- d. Penerbitan rekomendasi teknis pengesahan akta pemisahan rumah susun sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- e. Penerbitan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- g. Pencegahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kumuh pada Daerah.
- h. Penyelenggaraan PSU perumahan.

- i. Penerbitan rekomendasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
- k. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
- l. Pemberian rekomendasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah.
- m. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Adapun gambar Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS Dinas Perkimtan Kab.Gowa Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pengatur	II/c	1
2	Pengatur Tk.I	II/d	3
3	Penata Muda	III/a	1
4	Penata Muda Tk.I	III/b	2
5	Penata	III/c	3
6	Penata Tk.I	III/d	12
7	Pembina	IV/b	1
8	Pembina Utama Muda	IV/c	1
	Jumlah		24

C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di antaranya adalah :

1. Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa yang Belum Tertangani.
2. Masih Kurangnya prasarana dasar berupa jalan lingkungan dan drainase yang merupakan salah satu fasilitas permukiman yang sangat berpengaruh terhadap penataan kawasan permukiman.

3. Masih tingginya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Gowa.
4. Masih banyaknya aset Pemda yang di klaim oleh pihak lain.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. Strategi Organisasi

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai Tujuan pembangunan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis dan administrasi
2. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Berkoordinasi dengan BPN untuk pensertifikatan tanah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke 3 tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

Misi ke 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat

Sasaran : Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan Terintegrasi.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di antaranya adalah :

1. Mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman.
3. Meciptakan tertib administrasi tatakelola bidang pertanahan.
4. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat.

Berdasarkan pada tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa adalah :

1. Terwujudnya perumahan yang terjangkau dan layak huni.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman.
3. Terciptanya tertib administrasi tatakelola bidang pertanahan yang baik.
4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur.

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026.

Tabel Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasaran Pada Tahun n				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Rasio Rumah Layak huni	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Persentase Rumah Layak huni	72,95	73,30	73,60	73,90	74,20
Meningkatkan Legalitas Aset Lahan Pemda	Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah	Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat	53	56	60	63	65
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat	Nilai Sakip SKPD	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	100	100	100	100	100

B. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui kegiatan teknis dan administrasi
2. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak huni dan perbaikan rumah tidak layak huni
3. Berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) terkait pensertifikatan aset Pemda.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi program-program pelatihan peningkatan kompetensi sesuai tuntutan profesi dan organisasi
2. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana skala Kabupaten atau relokasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten
3. Penataan dan peningkatan kualitas hunian kawasan permukiman yang layak dan perbaikan rumah tidak layak huni khususnya pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
4. Mempercepat proses pensertifikatan tanah aset daerah.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Badan / Dinas pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor : 800/151.a/Perkimtan Tahun 2020. Adapun indikator kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN GOWA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Persentase Rumah Layak huni	72,95	73,30	73,60	73,90	74,20
	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00
Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat	53,00	56,00	60,00	63,00	65,00

A. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 maka disusunlah perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat program maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan dalam mengukur tingkat keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Perjanjian kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut :

Perjanjian Kinerja Eselon II

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan permukiman Layak Huni	Persentase rumah layak huni	%	73,30
		Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	56
2	Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Bersertifikat	%	56
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabiitas Aparatur	%	100

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.322.673.281
2. Program Pengembangan Perumahan	Rp 91.971.700
3. Program Kawasan Permukiman	Rp 51.702.256
4. Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 80.000.000
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 1.000.000
6. Program Penatagunaan Tanah	Rp 312.502.027

D. Standar Penilaian Kinerja.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diulas dan dianalisis hasil capaian kinerja atau lebih umum disebut Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa. Penilaian Laporan Kinerja ini merupakan pengukuran rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan dalam tahun bersangkutan, mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa, dimana Laporan Kinerja merupakan laporan yang menampilkan data beserta analisisnya dari hasil pencapaian kinerja dari seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dan direncanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Oleh karena itu Laporan Kinerja menjadi suatu bentuk pertanggung-jawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, yang ditinjau dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang berpedoman pada penetapan target Indikator Kinerja Sasaran, termasuk keterkaitan dengan penyerapan anggaran dan impact atau dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Wujud pengukuran yang tertuang dalam Laporan Kinerja tersebut memiliki factor-faktor sebagai obyek pengukuran. Faktor-faktor yang diukur adalah merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yaitu target, realisasi, capaian, dan keluaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah.

Pengukuran capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Adapun hasil pengukuran atas Indikator-indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Persentase Rumah Layak huni	%	73,30	73,27	99,96
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	56	56	100
2	Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat	%	56	55	98,21
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	%	100	100	100

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 99,54%** pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 98,17%.

Capaian pengukuran indikator kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini :

2. Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 -2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

TABEL REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Persentase Rumah Layak huni	72.33%	72,73%	73,27%				98,35%	99,96%			
	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	50%	54%	56%				100%	100%			
Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat	48%	50%	55%				94,33%	98,21%			
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	100%	100%	100%				100%	100%			

Pengukuran kinerja dari tahun 2023 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
 - a. **Indikator kinerja 1 : Persentase Rumah Layak huni** (realisasi dan capaian kinerja terjadi peningkatan).
 - b. **Indikator Kinerja 2 : Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani** (realisasi dan capaian kinerja terjadi peningkatan)
 - b) Sasaran strategis : Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda.
 - a. **Indikator kinerja 3 : Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat** (realisasi dan capaian kinerja terjadi peningkatan).
 - c) Sasaran strategis : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur.
 - a. **Indikator Kinerja 4 : Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur** (realisasi dan capaian kinerja terjadi peningkatan).
- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.**

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

TABEL REALISASI YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Persentase Rumah Layak huni	74,20%	72,73%	73,27%			
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	62%	54%	56%			
2	Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat	65%	50%	55%			
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	100%	100%	100%			

1. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel Realisasi Kinerja dengan Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Propinsi	
				Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100%	100%	100%
		Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

2. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Realisasi Indikator kinerja Meningkatnya Perumahan yang terjangkau dan layak huni tahun 2023 sebesar 73,27 % dengan capaian sebesar 99,96 %, hal ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dalam menyiapkan dokumen administrasi sebagai persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan, serta masih kurangnya regulasi pelaksanaan kegiatan yang lebih detail.

Realisasi Indikator kinerja Persentase Lahan Pemda Bersertifikat untuk tahun 2023 sebesar 55 % dengan capaian sebesar 98,21 % dari target 2023 sebesar 56 %, hal ini dikarenakan kegiatan pensertifikatan tanah bergantung pada kesediaan pihak BPN (Badan Pertanahan Negara) dalam melaksanakan pengukuran, sehingga kegiatan pensertifikatan tanah mengalami keterlambatan

sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai, serta masih banyaknya aset lahan Pemda yang diklaim oleh masyarakat (bermasalah hukum).

3. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya.

Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%	Efisiensi / In efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Persentase Rumah Layak huni	73,30%	73,27%	99,96%	90.017.000	89.242.600	99%	101	Efisiensi
	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	56%	56%	100%	32.511.285	30.000.000	92%	107	Efisiensi
Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat	56%	55%	98,21%	190.832.200	168.765.600	88%	112	Efisiensi
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	100%	100%	100%	3.154.719.467	2.848.374.060	90%	111	Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- a. Indikator Persentase Rumah Layak huni dengan capaian kinerja 99,96% dan capaian anggaran 99%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 101%
- b. Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 92%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 8% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 107%.
- c. Indikator Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat dengan capaian kinerja 98,21% dan capaian anggaran 88%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 12% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 112%.
- d. Indikator Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 90%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 10% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 111%.

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Perjanjian kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni	Persentase Rumah Layak huni	99,96%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%	
	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	100%	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	56%	56%	100%	
Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda	Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat	98,21%	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat	56%	55%	98,21%	
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	

1. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak huni.

Indikator 1 : Persentase Rumah Layak huni dengan target 73,30% telah berhasil terealisasi sebesar 73,27% dengan capaian sebesar 99,96% ini dapat terlaksana melalui Program Pengembangan Perumahan.

Indikator 2 : Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan target sebesar 56% telah berhasil terealisasi sebesar 56%, dengan capaian sebesar 100%, ini dapat terlaksana melalui Program Kawasan Permukiman.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda.

Indikator : Persentase Lahan Pemda Yang Bersertifikat dengan target sebesar 56% telah berhasil terealisasi sebesar 55% dengan capaian sebesar 98,21% ini dapat terlaksana melalui Program Penatagunaan Tanah.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur.

Indikator : Persentase Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas aparatur dengan target sebesar 100% telah berhasil terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

2. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 2 : Meningkatnya Legalitas Aset Lahan Pemda .

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah lebih memaksimalkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Kejaksaan Negri demi pencapaian target pensertifikatan tanah/aset Pemda.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 93 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Perkimtan Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	3.154.719.467,00	2.848.374.060,00	90
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.147.200,00	38.313.500,00	93
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	41.147.200,00	38.313.500,00	93
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.408.534.267,00	2.164.717.559,00	90
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.408.534.267,00	2.164.717.559,00	90
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	100
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	40.000.000,00	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.465.000,00	224.855.123,00	99
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1.578.000,00	-	0
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.087.000,00	220.055.123,00	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.496.100,00	26.600.000,00	64

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	41.496.100,00	26.600.000,00	64
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.037.300,00	279.137.725,00	89
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.189.000,00	46.614.525,00	86
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.848.300,00	232.523.200,00	90
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.039.600,00	74.750.153,00	89
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.729.300,00	56.750.000,00	92
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.410.000,00	7.200.000,00	63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.900.300,00	10.800.153,00	99
Program Pengembangan Perumahan	91.938.200,00	91.161.500,00	99
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	90.017.000,00	89.242.600,00	99
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	90.017.000,00	89.242.600,00	99
Kegiatan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.921.200,00	1.918.900,00	100
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1.921.200,00	1.918.900,00	100
Program Kawasan Permukiman	32.511.285,00	30.000.000,00	92
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	2.448.000,00	-	0
Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh	2.448.000,00	-	0
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	30.063.285,00	30.000.000,00	100

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	30.063.285,00	30.000.000,00	100
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80.000.000,00	79.997.700,00	100
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	80.000.000,00	79.997.700,00	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	80.000.000,00	79.997.700,00	100
Program Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4.095.000.000,00	3.885.553.815,00	95
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.095.000.000,00	3.885.553.815,00	95
Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.095.000.000,00	3.885.553.815,00	95
Program Penatagunaan Tanah	190.832.200,00	168.765.600,00	88
Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hambarannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	190.832.200,00	168.765.600,00	88
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	190.832.200,00	168.765.600,00	88

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2023 selain merupakan wujud pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Gowa ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh unit kerja / satuan kerja, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna bagi penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten gowa secara umum telah berhasil mencapai target kinerja. Dari 6 (Enam) Program dengan 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja secara memadai dengan angka rata-rata mencapai **93 %**. Program yang tidak memenuhi target yaitu program Penatagunaan Tanah. Belum tercapainya secara maksimal Program tersebut karena kegiatan pensertifikatan tanah sangat tergantung kepada kesiapan Badan Pertanahan Nasional dalam mengadakan kegiatan pengukuran lahan.

B. Langkah Perbaikan kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan,

peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, dan membuat MOU dengan pihak BPN serta kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sungguminasa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pensertifikatan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini kami susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

